



LAPORAN KINERJA

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SETDAPROVSU TAHUN ANGGARAN 2020



©Jan2021

Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa
pemerintah SetdaprovSU

Kantor Gubsu Lt.5

Jalan P.Diponegoro Nomor 30

Telp/Fax. 061- 4156000 Medan

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran yang berisi informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja yang termuat dalam laporan ini merupakan realisasi kinerja dari target kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

Secara umum, capaian kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU tahun 2020 telah tercapai dengan beberapa point yang sesuai target maupun yang mencapai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020. Laporan Kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU disusun dan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU Tahun 2020. Oleh karena itu, koordinasi yang lebih baik dengan unit kerja di lingkungan SetdaprovSU sangat diperlukan agar seluruh target kinerja yang diperjanjikan dapat dicapai.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU Tahun 2020 ini dapat memberikan manfaat untuk menentukan arah kebijakan dan strategi Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU pada tahun-tahun mendatang.

Medan, 2020

Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN DAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

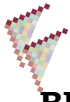
SAFRUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19650301 199303 1 006

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN	4
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	14
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	17
	A. CAPAIAN KINERJA	17
	B. REALISASI ANGGARAN	23
BAB IV	: PENUTUP	33

LAMPIRAN :

1. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019
2. DOKUMENTASI BERBAGAI KEGIATAN



LAPORAN KINERJA



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SETDAPROVSU TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU sesuai dengan Tugas dan Fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Bagian Keenam Pasal 34 menyatakan bahwa Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU mempunyai tugas membantu SekdaprovSU menyusun Konsep Kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, layanan pengadaan dan pengendalian pembangunan serta bina usaha jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian konsep kebijakan Kepala Daerah dalam hal pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi, pengendalian, kebijakan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pelaporan pembangunan serta pembinaan usaha jasa;
2. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, bina usaha jasa dan pelaksanaan administrasi pembangunan daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su berpegang pada budaya kerja seperti:

1. Mengutamakan profesionalisme, ketelitian, kecermatan, kearifan dan objektivitas dalam bekerja;
2. Mengutamakan disiplin dan waktu;
3. Berusaha bekerja dalam satuan Tim secara efisien, produktif, adaptif dan inovatif;
4. Berorientasi kepada hasil kerja yang prima;
5. Hemat dalam penggunaan dana, sarana dan prasarana;
6. Siap bekerja secara berkualitas.

Untuk menggambarkan identitas masa depan yang didambakan, maka dirumuskan visi dan misi Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah 2019-2023 sebagai berikut:

1. Visi Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah “Terwujudnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Transparan dan Akuntabel”
2. Misi Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah :
 - a. Mewujudkan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan yang Akuntabel dan Transparan melalui koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
 - b. Mewujudkan Koordinasi dengan Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan menginformasikan serta mempromosikan hasil-hasil pembangunan daerah di dalam maupun luar negeri sebagai upaya pembinaannya.

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan koordinasi dalam rangka Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan dan Hasil-Hasil Pembangunan antar lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah.
2. Mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, ditetapkan sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan pada point 1 tersebut di atas adalah mewujudkan tertib administrasi dan mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator sasaran:

- 1.1. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri
- 1.2. Terhimpun dan Terevaluasinya Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
- 2.1 Tertibnya Administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu
- 2.2 Terlaksananya proses pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Sasaran strategis yang harus dicapai untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas adalah meningkatkan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan antara lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dengan Indikator Sasaran:

- 1.1.1. Terkoordinirnya Lembaga-lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah dalam mengikuti pelaksanaan Pameran di dalam maupun di luar negeri yang meliputi Pameran, Hasil Pembangunan, Industri, Perdagangan, Kerajinan, Pariwisata, Budaya, Pertanian/Agro serta Potensi Investasi.
- 1.1.2. Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan
- 2.1.1. Adanya peningkatan pemahaman jasa penyedia Barang/Jasa.
- 2.1.2. Adanya kelancaran pelaksanaan proses tender pada Dinas/Instansi Pemprov.
- 3.2.1. Adanya operasional Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sumatera Utara
- 3.2.2. Terlaksananya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Memantapkan pelaksanaan tata kerja dan prosedur kerja yang berorientasi kepada efisien dan efektifitas.
- b. Mendorong timbulnya prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui pola partisipasi dan berkelanjutan.

- c. Melaksanakan pengawasan secara berjenjang dan mengevaluasi hasil pengawasan tersebut.

Sementara itu, sasaran strategis Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikelola pada tahun 2019 terdiri dari:

1. Terkoordinirnya dan Terfasilitasinya Instansi terkait Pemprov dan Mitra Binaannya dalam mengikuti Pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi Daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri;
2. Terlaksananya tertib administrasi pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;
3. Terlaksananya tertib administrasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan kegiatan APBD Provsu;
4. Terlaksananya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu dan Penginputan e-SSH;
5. Terwujudnya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui operasional LPSE Provsu.

Program Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su sesuai dengan Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD 2019-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
- g. Program Peningkatan Kapasitas Informasi Publik

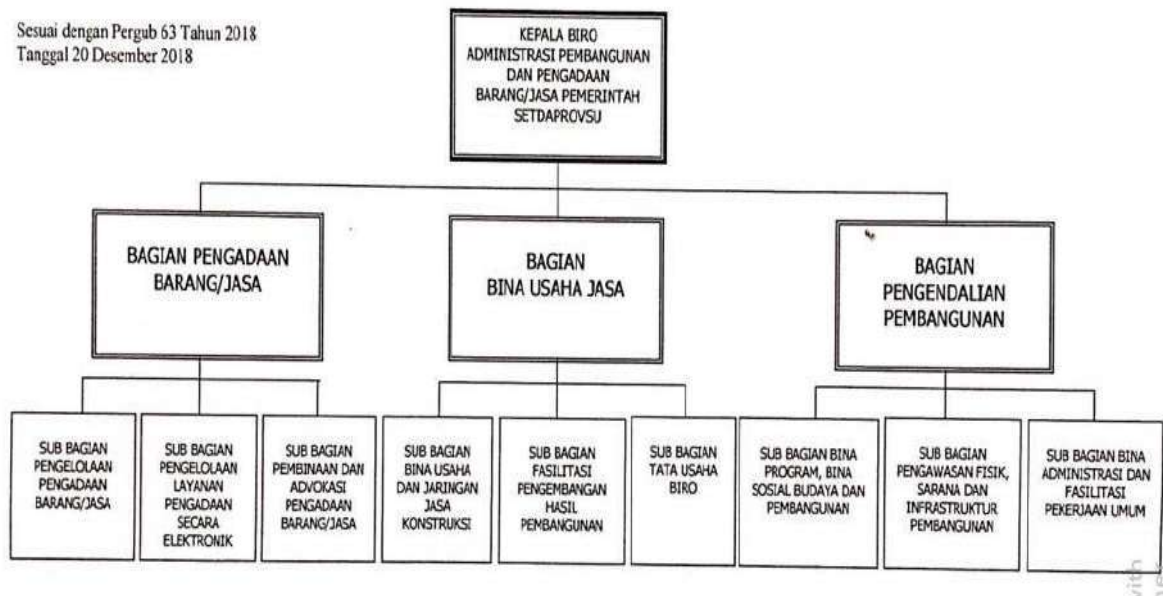
Untuk melaksanakan tugas fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah dibantu:

- a. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - a.1. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
 - a.2. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - a.3. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

- b. Bagian Bina Usaha Jasa
 - b.1. Sub Bagian Bina Usaha Jasa dan Jaringan Jasa Konstruksi
 - b.2. Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Hasil Pembangunan
 - b.3. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- c. Bagian Pengendalian Pembangunan
 - c.1. Sub Bagian Bina Program, Bina Sosial Budaya dan Pembangunan.
 - c.2. Sub Bagian Pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan.
 - c.3. Sub Bagian Bina Administrasi dan Fasilitas Pekerjaan Umum

STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SETDAPROVSU

Sesuai dengan Pergub 63 Tahun 2018
Tanggal 20 Desember 2018



**DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN JUMLAH PEGAWAI,
KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN GOLONGAN**

Unit Kerja : Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU

Kadaan : Per 31 Desember 2019

JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS KELAMIN

1. Laki-laki.....	=	27	Orang
2. Perempuan.....	=	18	Orang
JUMLAH.....	=	45	Orang

NO	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PNS DAERAH PROVINSI	KETERANGAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	IV/a	-	-
2	IV/b	1	-
3	IV/c	1	-
4	IV/d	-	-
5	IV/e	-	-
JUMLAH		2	-
6	III/a	2	-
7	III/b	12	-
8	III/c	17	-
9	III/d	9	-
JUMLAH		41	-
10	II/a	-	-
11	II/b	1	-
12	II/c	1	-
13	II/d	-	-
JUMLAH		2	-
14	I/a	-	-
15	I/b	-	-
16	I/c	1	-
17	I/d	-	-
JUMLAH		1	-
JUMLAH KESELURUHAN		45	-

JUMLAH PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar (SD)	=	1	Orang
2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	=	-	Orang
3. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	=	6	Orang
4. Sarjana Muda (SM)/ D-3	=	2	Orang
5. Sarjana (S-1)	=	33	Orang
6. Pasca Sarjana (S-2)	=	2	Orang
7. Doktoral (S-3)	=	-	Orang
JUMLAH.....	=	45	Orang

B. Landasan Hukum

Dasar-Dasar dalam pelaksanaan Laporan Kinerja 2019 Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN
3. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

- Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 Nomor 5);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provsu.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprovsu haruslah didukung oleh kekuatan berbagai sumber daya yang ada, namun sampai saat ini Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprovsu masih memiliki seperti jumlah staf yang kurang memadai termasuk sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas masih minim.

Strategic issued (permasalahan utama) yang sampai saat ini terjadi adalah:

- a. Dalam rangka mengkoordinir dan memfasilitasi instansi terkait pemprovsu dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan, kuantitas dan kualitas barang pameran dari SKPD dan mitra binaan perlu ditingkatkan.
- b. Aplikasi sistem e-planning, e-budgeting dan e-keuangan yang membutuhkan data Satuan Standard Harga (SSH), maka untuk menunjang pelaksanaannya dibutuhkan kesiapan berbagai hal termasuk penerapan aplikasi Satuan Standar Harga (e-SSH) tahun 2019, dimana Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprovsu bagian dari Tim Penyusunan e-SSH.
- c. Peran dan fungsi Unit Layanan Pengadaan Provsu yang semakin berperan dan dibutuhkan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
- d. Masih kurang seriusnya OPD dalam memberikan laporan bulanan tentang penataan sistem pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

APBD dan peranan pejabat penghubung TEPRAs Provsu dan Kabupaten/Kota

- e. Sistem pelaporan bulanan dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis Informasi dan Teknologi (IT) sehingga koordinasi dapat terlaksanakan dengan cepat dan transparansi.

Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana telah diterbitkannya Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan telah diundangkan menjadi Petunjuk Teknis dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa sebutan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) menjadi Laporan Kinerja (LK); sementara itu sebutan untuk Dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN) menjadi Perjanjian Kinerja (LK).

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II PERENCANAAN KINERJA
3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - B. Realisasi Anggaran
4. BAB IV PENUTUP
5. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 - Perjanjian Kinerja (Tapkin 2019)
 - Lain-lain

BAB II

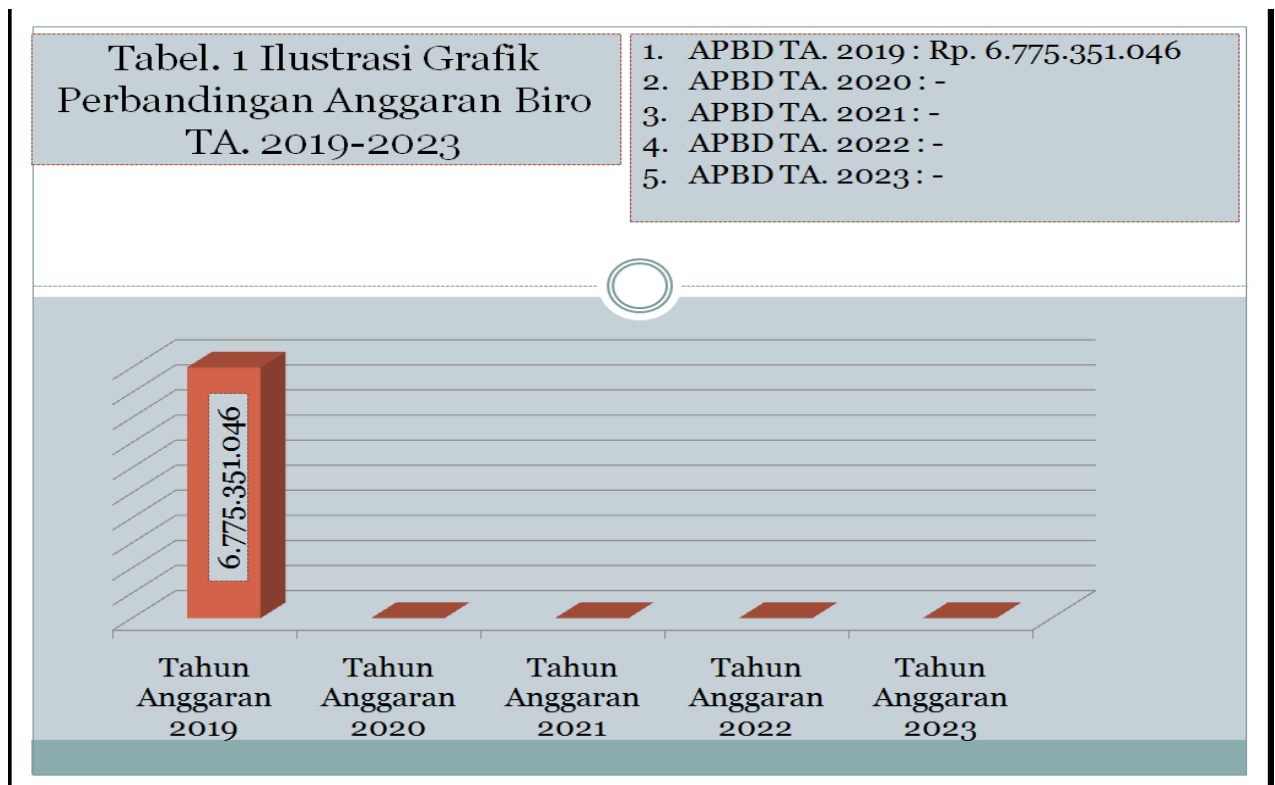
PERENCANAAN KINERJA



I. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Mewujudkan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel	Persetanse Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	100 %
2	Mewujudkan pelaporan realisasi Fisik, Keuangan APBD Provsu yang Efisien	Persentase Penyerapan Anggaran APBD dengan realisasi fisik, keuangan APBD oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Provsu	100 % 49 OPD

Tabel 1 Perbandingan Anggaran Biro 2019 – 2023



II. Pelaksanaan Kinerja Tahun 2019

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja masing-masing, maka program/kegiatan strategis Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU Tahun Anggaran 2019 yang telah terjadwal dan berkelanjutan menghasilkan:

1. Terselenggaranya Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara.
2. Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Jakarta.
3. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait PemprovSU dalam mengikuti Expo atau atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand PemprovSU didalam dan Luar Negeri.
4. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi

- Paviliun Pemprovsu mengikuti Pesta Pulau Pinang di Pulau Pinang Malaysia.
5. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu.
 6. Kegiatan UKPBJ dengan Pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 2. Rekapitulasi Rencana Kerja Anggaran Perubahan menurut Program Kerja dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	Program	APBD TA. 2019 (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah perubahan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	738.968.260,-	738.968.260,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.999.905,-	0,-
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	831.830.825,-	390.952.825,-
4.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	2.511.333.835,-	2.148.476.235,-
5.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	3.800.171.314,-	2.743.865.336,-
6.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	1.172.588.390,-	753.088.390,-

Dikarenakan adanya perubahan pada APBD Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah di TA.2019, ada kegiatan yang sudah terdaftar di DPA sebelum perubahan harus dilakukan penghapusan untuk kegiatan itu.

Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa mendapat perubahan yang signifikan di APBD TA.2019, tetapi tidak menjadi penghalang untuk mewujudkan Visi dan Misi Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai yang sudah tertera diatas.

BAB III



AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2019 yang memuat realisasi kinerja dan capaian strategis kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2019. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2019 disajikan juga dalam Bab ini.

A. Capaian Kinerja

Sebagaimana yang telah diperjanjikan pada Kontrak Kinerja yang telah ditandatangani antara Gubernur Sumatera Utara dengan Kepala Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja masing-masing, maka program/kegiatan strategis Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU Tahun Anggaran 2019 yang telah terjadwal dan berkelanjutan menghasilkan:

1. Terselenggaranya Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara
2. Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pekan Raya Jakarta
3. Pembinaan dan Dukungan kepada Dekranasda dan Instansi Terkait PemprovSU dalam mengikuti Expo atau atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand PemprovSU didalam dan Luar Negeri
4. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait PemprovSU beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun PemprovSU mengikuti Pesta Pulau Pinang di Pulau Pinang Malaysia.
5. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD ProvSU
6. Kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dengan Pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa

III. Hasil Yang Dicapai

Dari berbagai Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019, maka diperoleh hasil kegiatan strategis sebagai berikut:

1. Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov dan mitra binaannya dalam mengikuti pameran-pameran hasil pembangunan serta potensi daerah Sumatera Utara di Dalam dan Luar Negeri.

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan	Tempat	Dana	Jumlah Peserta	Ket
1	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Sumatera Utara	08 Maret - 08 April 2019	Medan	497.096.797	41	
2	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun Pemprov mengikuti Pekan Raya Jakarta	22 Mei – 30 Juni 2019	Jakarta	599.967.000		
3	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitas Paviliun Pemprov mengikuti Pesta P.Pinang-Malaysia	Nopember – Desember 2019	P.Penang	558.437.625		
4	Pembinaan dan Dukungan kepada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprov dalam mengikuti Expo atau Gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprov di Dalam dan Luar Negeri :	SATU TAHUN ANGGARAN		404.500.000		
	1. Indonesia Fashion Week Tahun 2019 (IFW)	27 s/d 31 Maret 2019	JCC Jakarta	47.600.000 15.680.000	13	Stand Dekor
	2. Inacraft 2019	April 2019	JCC Jakarta			Stand Dekor
	3. Pameran Inveda Expo 2019	April 2019	Jogjaka			Stand

4. Pameran Dekranas 2019	September 2019	JCC Jakarta		Dekor
5. Jatim Fair 2019	Oktober 2019	Surabaya		Stand Dekor
6. Bali ITT Expo 2019	Oktober 2019	Bali		Stand Dekor
7. Indonesia Infrastruktur Week 2019 (IIW 2019)	Oktober – Nopember 2019	Jakarta		Stand
8. Batam Inafact 2019	Nopember – Desember 2019	Batam		Stand Dekor

2. Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Provsu.

Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU sebagai salah satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya melakukan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas/Badan/Instansi Pengguna Anggaran APBD Provsu, sehingga dapat diketahui perkembangan pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tepat waktu dan tepat sasaran.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah SetdaprovSU melalui kegiatan Penataan Sistem Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Provsu TA. 2019 telah menghimpun data setiap bulan dan dijadikan satu buku laporan khusus, serta mengevaluasi perkembangan pelaksanaan APBD Provsu TA. 2019. Untuk Tahun 2019 akan ditingkatkan melalui aplikasi e-pelaporan realisasi fisik dan keuangan APBD secara bulan diupdate.

Maksud Dan Tujuan

- Mengetahui perkembangan keadaan Fisik dan Keuangan P-APBD Provsu pada masing-masing Pengguna Anggaran;

- Mengetahui Permasalahan/Kendala yang dihadapi Instansi Pengguna P-APBD Provsu serta solusi tindak lanjutnya.

Saran/Tindak Lanjut

- Agar masing-masing Instansi pengguna APBD Provsu dapat secara rutin setiap bulan dengan tepat waktu melaporkan keadaan fisik dan keuangan dengan hardcopy serta softcopy ke Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprovusu
- Akan dibangunnya aplikasi e-pelaporan P2 Sumut realisasi fisik dan keuangan APBD secara bulan diupdate
- Akan diberikan surat teguran kepada OPD pemakai dana APBD Provsu agar segera menyampaikan laporan bulanan dimaksud

3. Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2019

Hasil Dicapai

- ✓ Terbitnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/1591/KPTS/2018 tentang Tim Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019.
- ✓ Terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 67 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2019
- ✓ Pedoman Bagi Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara TA.2019
- ✓ Alokasi Anggaran Rp. 187.320.532,- Realisasi Anggaran Rp.187.258.132,-

Saran/Tindak Lanjut :

- Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara agar lebih efektif, efisien, tepat mutu, waktu dan tepat sasaran sesuai target yang ditetapkan.
- Kegiatan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara menjadi ketentuan dan peraturan serta pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah didalam pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara.
- Untuk dapat diintegrasikan ke dalam Aplikasi e-sumut yang setiap awal tahun untuk dapat dipedomani oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi

Sumatera Utara pemakai dana APBD Provinsi Sumatera Utara

4. Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara pada OPD/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Hasil :

- Terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/115/KPTS/2019 tentang Tim Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019
- Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring dan evaluasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa UPT OPD Teknis di Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan Fisik, Sarana dan Infrastruktur Pembangunan (Laporan Perjalanan Dinas)
- Koordinasi dan Konsultasi dengan melakukan perjalanan dinas ke Kementerian Terkait yang mendukung pengawasan administrasi di Bidang pengelolaan Pengawasan Fisik, Saran dan Infrastruktur Pembangunan (Laporan Perjalanan Dinas)
- Alokasi Anggaran Rp.378.774.150.- Realisasi Anggaran Rp. 372.259.612.-

Saran dan harapan :

- *Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan APBD Provinsi Sumatera Utara dapat lebih efektif, efisien, tepat waktu dan tepat sasaran*
- *Kegiatan ini bermamfaat dan menjadi satu tolak ukur bagi Sekretariat Daerah sebagai perpanjangan tangan Gubernur Sumatera Utara di dalam membina OPD terkait sehingga Gubernur Sumatera Utara mendapat informasi yang tepat dan akurat terhadap kegiatan fisik di lapangan*
- *Memiliki tenaga ahli yang mumpuni untuk kegiatan dimaksud sehingga keadaan realisasi fisik dan anggaran tidak terdapat gap yang tinggi*

5. Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provsu

Hasil:

- Koordinasi dan Konsultasi dengan melakukan perjalanan dinas ke Kementerian terkait yang mendukung Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Laporan Perjalanan Dinas)
- Koordinasi/Konsultasi dan monitoring evaluasi dengan melakukan perjalanan dinas ke beberapa Kabupaten/Kota (Kab/Kota yang mengikuti Program PPSP) yang mendukung Pengelolaan Program

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, (Laporan Perjalanan Dinas)

- Alokasi Anggaran Rp. 224.748,050.- Realisasi Anggaran Rp. 222.597.850.-

6. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE

Hasil:

- Terlaksananya persentase pengadaan barang/jasa yang efisien dan akuntabel dimana untuk jumlah paket yang di targetkan tahun 2019 melebihi dari target
- Untuk alokasi anggaran mencapai 98% dengan telah terlaksanakannya beberapa sosialisasi dan rapat koordinasi antara perangkat daerah dan kabupaten/kota

Tabel 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dan LPSE Provsu

NAMA PROGRAM	KEGIATAN	HASIL DICAPAI*	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)
I. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (UKPBJ)	Terlaksananya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi UKPBJ Kabupaten/Kota dan OPD Provsu	213.452.825	203.808.510
II. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelayanan Pencapaian Kinerja dan Keuangan	Kegiatan UKPBJ dengan Pihak yang terkait Pengadaan Barang/Jasa	Terlaksananya Operasional kebutuhan UKPBJ Provsu dan Bimbingan Teknis bagi POKJA UKPBJ Provsu	1.664.505.300	1.531.524.776
III. Peningkatan Kapasitas Informasi Publik	Operasional LPSE Provsu	Terlaksananya Operasional LPSE Provsu	347.819.349	345.234.013
	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis LPSE Provsu	Terselenggaranya Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perpres 16 Tahun 2019 dan Pemahaman tentang Aplikasi SPSE Versi 4.3 bagi penyedia	78.946.760	52.151.660
	Peningkatan Penguatan Kelembagaan LPSE Provsu	Terlaksananya Peningkatan Kelembagaan LPSE Provsu dengan melakukan Koordinasi ke LKPP-RI dan LPSE Departemen Dalam Negeri RI	89.997.575	86.111.275

	Rapat Koordinasi LPSE Kab/Kota se-Sumatera Utara	Terlaksananya Rapat Koordinasi LPSE Kab/Kota sekaligus Pemahaman tentang Perpres No. 16 Tahun 2019.	199.524.900	189.844.600
	Koneksi Internet LPSE Provsu	Terlaksananya Perawatan/Perbaikan jaringan internet LPSE Provsu	36.799.806	36.799.806

Tabel 3. Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditenderkan Tahun 2019

No.	Klasifikasi	Jumlah Paket	Pagu Anggaran (Rp)
1	Barang (B)	225	567.764.065.618,-
2	Pekerjaan Konstruksi	311	985.620.792.614,-
3	Jasa Konsultasi (JK)	133	108.389.831.690,-
4	Jasa Lainnya (JL)	70	70.388.511.925,-
5	Jumlah	739	1.732.388.511.925

Sementara jumlah penyedia yang terdaftar di LPSE s.d tahun 2019 sebanyak 15.687 penyedia/perusahaan

B. Realisasi Anggaran

Tabel Anggaran Biro TA. 2019

NO	Program	APBD TA. 2019 (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	%
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	738.968.260	701.297.310	94,90
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	390.952.825	259.124.310	66,28
4	Program Pengembangan Sistem	2.148.476.235	2.001.627.451	93,16

	Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
5	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	2.743.865.336	2.540.452.523	92,59
6	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	753.088.390	710.141.354	94,30

Tabel. Capaian Kinerja TA. 2019

Program	Kegiatan	Realisasi Fisik (%)	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Solusi
Program Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran/Keuangan	89,23	Medan	194.208.000	173.300.000	-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	97	Medan	45.995.010	44.434.800	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	92,97	Medan	38.898.500	36.164.400	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	98	Medan	14.700.000	14.470.000	-	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah dan luar daerah	97,84	Medan	399.388.000	390.763.110		
	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Adm.Pembangunan SetdaprovSU	94,69	Medan	9.874.375	9.350.000		
	Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	89	Medan	27.000.000	24.025.000		
	Penyusunan Laporan Kinerja (lk) dan Perjanjian Kerja (PK) Biro Adm. Pembangunan SetdaprovSU, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja)	98,72	Medan	8.904.375	8.790.000	-	

	Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu						
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Penyelenggaraan Informasi Elektronik melalui Website Biro Adm. Pembangunan Setdaprovsu	0	Medan	0	0		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sosialisasi Unit Layanan Pengadaan (UKPBJ)	95,48	Medan	213.452.825	203.808.510		
	Assesmen Anggota Pokja Pemilihan UKPBJ Pemprov	32	Medan	177.500.000	55.315.800		
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	99,14	Medan	204.478.330	202.728.700	Penyampaian Laporan bulanan selalu terlambat diakibatkan pengelolaan kegiatan tidak tepat waktu menyampaikan laporan	Perlu ditingkatkan fasilitas sistem pelaporan bulanan dengan menggunakan sistem pelaporan berbasis Informatika dan Teknologi (IT)
	Pengkoordiniran dan Pelaporan Aktivitas Pengadaan APBD Provsu dan APBD Kab/Kota serta Monev Sismontep TEPR Provsu	98,21	Medan	79.494.100	78.072.000	Tidak adanya sanksi kepada SKPD yang terlambat dan tidak menyampaikan Laporan Bulanan Kegiatan APBD Provsu	

	Kegiatan UKPBJ Dengan Pihak Terkait Pengadaan Barang/Jasa	92,01	Medan	1.664.505.300	1.531.524.776		
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Pekan Raya Sum. Utara	83,60	Medan	493.496.795	412.548.543	Kondisi gedung Paviliun Pemprov su kurang baik karena beberapa plafon ada yang rusak	Perlu adanya perbaikan plafon sehingga gedung Paviliun Pemprov su lebih kondusif dan layak dipergunakan untuk promosi
	Pengorganisasian dan Pengkoordiniran Instansi Terkait Pemprov su beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprov su mengikuti Pesta P.Pinang/ Malaysia	79,62	Pulau Pinang - Malaysia	427.447.625	340.337.469	Belum maksimalnya hasil atau potensi Sumatera Utara yang dapat diinformasikan, kegiatan ini belum dapat diikuti oleh beberapa Instansi yang seharusnya dapat/ layak untuk mengikutinya	Instansi terkait yang mengikuti kegiatan promosi dapat menjadikan kegiatan dimaksud menjadi agenda kegiatan melalui usul dalam APBD Provsu serta dapat berkoordinasi dengan Kab/ Kota untuk dapat mengikutinya melalui Pemprov su

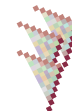
	Pembinaan dan Dukungan kepada Pengembangan Ekonomi Kreatif, Dekranasda dan Instansi Terkait Pemprovsum dalam mengikuti Expo atau gelar Produk Kerajinan Nasional dan Potensi Lainnya melalui Stand Pemprovsum didalam dan Luar Negeri	100	Dalam Negeri	230.236.700	230.236.700	Belum maksimalnya hasil atau potensi Sumatera Utara yang dapat diinformasikan, mengingat kegiatan ini belum dapat diikuti oleh beberapa Instansi yang seharusnya dapat untuk mengikutinya	Perlu ditingkatkannya koordinasi antar instansi dilingkungan Pemprovsum tentang Keikutsertaan dalam Kegiatan-kegiatan ini
	Pengorganisasian dan Pengkoordinasian Instansi Terkait Pemprovsum beserta Mitra Binaannya dalam rangka Pembinaan dan Fasilitasi Paviliun Pemprovsum mengikuti Pekan Raya Jakarta	96,00	Jakarta	582.071.284	558.802.925	Bahan/Barang Pameran yang ditampilkan dalam stand terlalu padat, sehingga mengurangi keindahan stand dan kerapian penampilan stand	Perlu dilakukan penambahan luas stand Perlu dilakukan pengaturan jumlah bahan/barang pameran sehingga ideal untuk ditampilkan.
	Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Sumatera Utara	99,04	Medan	224.748.050	222.581.660		

	Penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	99,97	Medan	187.320.532	187.258.132	sampai saat ini berjalan dengan baik, hanya terkendala masa penyusunan dikarenakan berbagai perubahan peraturan per-UU an	Disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan per-UU an
	Pengelolaan Program Perumahan Kawasan Permukiman	100	Sumut	34.250.000	34.250.000	Masih belum kuatnya capacity building aparatatur tuk sadar sanitasi pemukiman	perlu terus dilakukan kegiatan ini berkelanjutan
	Pemberdayaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Provsu dan Kab/Kota se – SU	97,65	Medan	141.630.200	138.296.255	masih minimnya pertemuan-pertemuan Tim Pembinaan Provsu dengan Kab/ Kota	diupayakan di tahun mendatang dapat ditingkatkan .
	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Non Konstruksi	0	Medan	0	0		
	Pengendalian kegiatan APBD Provsu pada SKPD/UPT di Lingkungan Provsu	98,28	Medan	378.774.150	372.259.612		
	Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	0	Medan	0	0		
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Operasional Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	99,26	Medan	347.819.349	345.234.013		

Publik	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	66,06	Medan	78.946.760	52.151.660		
	Peningkatan Penguatan Kelembagaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	95,68	Medan	89.997.575	86.111.275		
	Rapat Koordinasi LPSE Kab/Kota se Sumatera Utara	95,15	Medan	199.524.900	189.844.600		
	Koneksi Internet Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provsu	100	Medan	36.799.806	36.799.806		

BAB IV

PENUTUP



Dari hasil realisasi dan analisis kinerja kegiatan serta analisis pencapaian sasaran dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su tahun 2019 baik dilihat dari segi pencapaian kinerja kegiatan maupun pencapaian sasaran cukup berhasil dilaksanakan, karena masing-masing kegiatan telah terlaksana sesuai dengan yang diprogramkan dan telah mencapai sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara umum pula dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 dan target jangka menengah.

Dalam proses pencapaian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov su pada umumnya tidak ada mengalami kendala tetapi untuk kedepan diharapkan seluruh aparatur Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su dituntut harus lebih tegas dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga Visi Misi tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Langkah-langkah ke depan untuk peningkatan kinerja tahun 2019, disamping pembinaan dan untuk peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, juga diarahkan untuk:

- Mendorong kepedulian unit kerja dalam menindaklanjuti hasil laporan kinerja
- Mendorong aparatur sipil negara di lingkungan Biro untuk mengikuti bimbingan teknis maupun Diklat-diklat untuk peningkatan kualitas aparatur dan manajemen kinerja guna mencapai peningkatan kinerja tahun 2019 mendatang, baik didukung dengan anggaran yang bersumber dari DPA yang dianggarkan dalam program dan kegiatan.
- Pemberian motivasi kepada para staf untuk meningkatkan kemauan, kesungguhan, kemampuan dan ketrampilannya
- Perbaiki sarana dan prasarana Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su

Akhirnya dengan harapan demikian diharapkan kinerja Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su akan dapat ditingkatkan seiring harapan tertingkatnya anggaran Biro administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa pemerintah Setdaprov su pada APBD di masa mendatang.

-oOo-